Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam
Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025
e-ISSN: 2655-883

TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN SESAMA SUKU DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI SUKU LAMAHOLOT (STUDI KASUS DI KECAMATAN ILE APE)

Ahmad Walanda[1], Shofiatul Jannah[2], Abdul Wafi[3]
[1]Universitas Islam Malang, [2]Universitas Islam Malang, [3]Universitas Islam Malang
e-mail: [1]22101012039@unisma.ac.id, [2]shofia@unisma.ac.id,
[3]abdul.wafi@unisma.ac.id

Abstract

This study examines the tradition of prohibiting intra-tribal marriages within the Lamaholot indigenous community in Ile Ape Village, Lembata Regency. The prohibition is based on the belief that individuals from the same tribe are considered kin; thus, marriage between them is deemed a violation of custom and believed to bring misfortune to the couple and their descendants. The objective of this research is to describe the practice of this prohibition and analyze it from the perspectives of Islamic law and customary law. This research uses a qualitative case study approach with data collected through interviews, observation, and documentation. The findings indicate that although Islamic law permits intra-tribal marriage as long as it does not involve prohibited (mahram) relationships, the Lamaholot community firmly upholds the ban based on ancestral customs. The study highlights both similarities and differences between Islamic law and customary law, and emphasizes the need for a harmonious approach in understanding marriage practices within multicultural societies.

Keywords: *Intra-tribal marriage*, *Islamic law*, *customary law*, *Lamaholot community*, *Ile Ape*

A. Pendahuluan

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia di dunia ini selain untuk beribadah juga untuk hidup berpasang-pasangan, yakni sebagai pria dan wanita. Namun, cara manusia memenuhi keinginannya berbeda dengan makhluk lain. Agar kehidupan berpasangan manusia tetap terjaga kesempurnaannya, Tuhan menganugerahkan suatu kehormatan berupa ikatan yang disebut pernikahan (Sembiring et al., 2023).

Hukum asal pernikahan adalah sunnah, yaitu suatu anjuran yang merupakan bagian dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Pernikahan diinginkan bagi mereka yang mampu menafkahi keluarga dan memiliki keinginan untuk menikah. Menikah adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT yang dapat bernilai pahala apabila dilaksanakan sesuai dengan tutunan Islam. Selain itu, pernikahan memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental, serta dapat mengubah kehidupan seseorang menuju keselamatan di dunia dan akhirat. Dalam Islam,

This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available online on: http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index

pernikahan didasarkan pada prinsip yang kuat dan kokoh, dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang tenteram, membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia baik lahir maupun batin (Nurliana, 2022).

Pernikahan merupakan suatu ikatan kesepakatan antara dua orang untuk hidup bersama, saling bekerja sama, dan mencapai tujuan bersama dalam segala keadaan suka maupun duka. Oleh karena itu, dalam pernikahan terdapat tanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, baik bagi suami maupun istri. Selain itu, pernikahan juga memiliki beragam bentuk upacara yang disesuaikan dengan adat istiadat, budaya, dan agama dari masing-masing masyarakat (Fadilah, 2021).

Menurut Rahangiar N., (2024) dalam hukum Islam, pernikahan ialah akad kuat (*mitssaqan ghalidzan*) yang mengikat suami dan istri secara lahir dan batin. Ikatan ini merupakan ketaatan kepada Allah dan ibadah, serta dasar untuk membangun keluarga harmonis sesuai ajaran Agama Islam. Oleh karena itu, Islam mengatur pernikahan dari berbagai aspek, seperti perilaku, cara berpakaian, pergaulan, hingga tanggung jawab yang menyertainya. Islam mengajarkan manusia untuk berpikir jauh ke depan, tidak sekadar mengikuti hawa nafsu atau meniru gaya hidup Barat yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan (Maimun, 2022).

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 tentang pernikahan, atau pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun tujuan dari pernikahan menurut islam yang dijelaskan dalam al-Qur'an berikut ini yaitu (Qs Ar-rum ayat 21):

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya; *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir* (Qs Ar-rum ayat 21).

Indonesia sebagai negara yang beragam dan kaya akan budaya memiliki tradisi pernikahan yang sangat beragam, mencerminkan pertemuan antara hukum adat dan ajaran Islam. Dalam berbagai etnis, pernikahan tidak hanya merupakan ikatan sah secara agama, tetapi juga dijalankan dengan proses adat yang telah menjadi

bagian dari hukum tak tertulis atau hukum adat yang memiliki kekuatan mengikat dalam masyarakat (Purnama, 2021).

Dalam pernikahan, biasanya ada adat atau tradisi yang berasal dari suatu suku atau kelompok etnis di daerah tertentu. Suku atau etnis sendiri adalah kelompok sosial yang memiliki ciri khas yang membedakannya dari kelompok lain, biasanya terlihat dari budaya dan terutama bahasa yang digunakan. Selain itu, identitas etnis juga dapat dilihat dari warna kulit, kepercayaan, kelas sosial, pandangan politik, status sebagai kelompok minoritas, hingga sistem pendidikan yang dianut. Karena adanya kesamaan ciri-ciri dan latar belakang tersebut, maka terbentuklah rasa kebersamaan yang menjadi dasar ikatan dalam suatu kelompok etnis (Werliana et al., 2024).

Dalam konteks tersebut, masyarakat adat Lamaholot juga menunjukkan bagaimana tradisi pernikahan merupakan bagian penting dari identitas suku mereka. Dalam kehidupan masyarakat Lamaholot, pernikahan tidak hanya melibatkan kedua mempelai, tetapi juga melibatkan orang tua, saudara, keluarga besar dari kedua belah pihak, serta masyarakat adat secara keseluruhan. Dalam hukum adat mereka, pernikahan bukan sekedar momen pribadi, melainkan peristiwa sakral yang memiliki makna mendalam, bahkan melibatkan perhatian dan pengawasan langsung dari ketua adat, karena dianggap penting tidak hanya bagi yang hidup, tetapi juga dalam kaitannya dengan leluhur dan warisan budaya mereka (Jamaludin, 2024).

Fenomena larangan pernikahan sesama suku Lamaholot di Desa Ile Ape, menjadi salah satu persoalan yang cukup kompleks dalam masyarakat setempat. Larangan adat ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat karena adanya perbedaan persepsi mengenai berlangsungnya aturan tersebut dalam kehidupan modern. Pernikahan dilakukan dengan orang dari suku berbeda untuk menjaga garis keturunan dan harmoni sosial. Sehingga diperlukan pemahaman dan penyesuaian agar adat tetap dihormati tanpa menghambat hubungan sosial yang harmonis di suku Lamaholot (Werliana et al., 2024).

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang terjadi di Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, di mana sebagian masyarakat mulai menerima pernikahan sesama suku karena adanya perubahan pola pikir dan pengaruh modernisasi. Sebaliknya, masyarakat di Kecamatan Ile Ape hingga saat ini masih menjunjung tinggi larangan pernikahan sesama suku Lamaholot secara mutlak tanpa mengalami perubahan, karena dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap adat dan warisan leluhur yang diyakini membawa akibat buruk bagi pelaku dan keturunannya.

Adapun kebaruan dalam penelitian ini terletak pada lokasi. Penelitian ini merupakan kajian pertama yang secara khusus meneliti tradisi larangan pernikahan sesama suku Lamaholot di Kecamatan Ile Ape dengan pendekatan hukum Islam dan hukum adat secara bersamaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang belum pernah diungkapkan dalam studi sebelumnya, khususnya terkait dengan kekuatan adat dalam masyarakat Lamaholot dan relevansinya dengan ajaran Islam masa kini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka fokus dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana praktik larangan pernikahan sesama suku Lamaholot di Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata? (2) bagaimana analisis hukum Islam dan hukum adat terhadap larangan pernikahan sesama suku Lamaholot di Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata? Sejalan dengan fokus tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengkaji praktik tradisi larangan pernikahan sesama suku Lamaholot yang berlaku di Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, dan (2) menganalisis tradisi larangan pernikahan sesama suku Lamaholot dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat

B. Metode

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti berupaya untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai urgensi larangan pernikahan sesama suku Lamaholot di Desa Ile Ape dalam konteks adat dan sosial dan keagamaan masyarakat setempat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami praktik tradisi larangan pernikahan sesama suku dalam masyarakat Lamaholot di Desa Ile Ape. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam nilai-nilai budaya dan keyakinan adat yang mendasari berlakunya larangan tersebut dalam struktur sosial masyarakat (Ismail, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, yakni penelitian yang bertumpu pada data primer yang diperoleh dari masyarakat melalui wawancara dan observasi lapangan. Berbeda dengan pendekatan normatif, pendekatan ini lebih menekankan pada pengalaman sosial dan realitas hukum yang hidup di tengah masyarakat (Ibrahom, 2022).

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam dan hukum adat terhadap larangan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan empiris sangat relevan untuk menggali tidak hanya aspek penerapan larangan dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga persepsi tokoh agama dan tokoh adat sebagai representasi dari norma keagamaan dan budaya lokal. (Ibrahom, 2022).

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer, berupa hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat, serta data sekunder, berupa dokumen hukum, literatur akademik, dan referensi lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi (Atmajaya, 2021; Shandi, 2020; Wiranti, 2021). Wawancara dilakukan secara fleksibel untuk menyesuaikan konteks dan memperdalam pemahaman terhadap makna tradisi. Observasi dilakukan untuk melihat langsung praktik sosial dan adat yang berlangsung di masyarakat. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat data lapangan.

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman & Saldana (2014), yang meliputi tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu guna memastikan konsistensi informasi (Wahyudi, 2020; Nurfajriani et al., 2024).

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Larangan Pernikahan Sesama Suku Lamaholot di Desa Ile Ape, Kabupaten Lembata

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Ile Ape secara tegas memegang prinsip larangan pernikahan sesama suku Lamaholot. Larangan ini tidak hanya berlaku antar fham atau suku, tetapi mencakup seluruh anggota suku Lamaholot secara umum. Pandangan ini tumbuh dari keyakinan adat bahwa orang yang berasal dari suku yang sama tetap dianggap sebagai satu saudara secara budaya dan spiritual, sehingga pernikahan antar mereka dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap norma adat. Pelanggaran terhadap larangan ini diyakini membawa konsekuensi buruk, baik secara sosial, moral, maupun spiritual. Pasangan yang tetap nekat menikah sesuku akan mengalami penolakan sosial, tidak diakui secara adat, dan bahkan dapat dikenai sanksi adat yang cukup berat. Kepercayaan ini telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat dan masih dipertahankan secara ketat hingga saat ini.

2. Analisis Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Larangan Pernikahan Sesama Suku dalam Masyarakat Lamaholot di Desa Ile Ape

Dari perspektif hukum Islam, tidak ada larangan pernikahan sesama suku. Islam hanya melarang pernikahan antara dua orang yang memiliki hubungan mahram, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ
الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآىِٕكُمْ وَرَبَآىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآىِٕكُمُ
الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَآىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ
وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya ; *Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama di Desa Ile Ape, diketahui bahwa Islam tidak pernah mengatur larangan pernikahan berdasarkan suku. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, pernikahan sesama suku adalah sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi, serta tidak melibatkan hubungan mahram. Namun demikian, tokoh agama di desa tersebut tetap menghormati eksistensi adat yang berlaku, dan tidak serta-merta menentang aturan adat yang telah lama mengakar. Mereka memilih pendekatan edukatif, dengan memberikan pemahaman agama yang moderat kepada masyarakat, sembari tetap menjaga harmoni dengan nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi.

Dalam pandangan hukum adat masyarakat Lamaholot di Desa Ile Ape, larangan pernikahan sesama suku merupakan norma adat yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Aturan ini bukan hanya tradisi turun-temurun, melainkan juga dianggap sebagai bagian dari sistem hukum adat yang memiliki sanksi dan otoritas tersendiri. Para tetua adat memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan aturan ini dijalankan dengan tegas. Apabila terdapat pelanggaran, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah adat, yang hasilnya bisa berupa penolakan terhadap pasangan, pengucilan, atau sanksi sosial lainnya. Larangan ini dipandang sebagai cara menjaga kemurnian garis keturunan, mempererat ikatan antar keluarga besar, serta mempertahankan nilai-nilai luhur suku Lamaholot. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum adat, larangan ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar.

Pelestarian aturan ini juga dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan identitas budaya masyarakat Lamaholot secara keseluruhan.

Pembahasan

1. Tradisi Larangan Pernikahan Sesama Suku dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Adat di Suku Lamaholot Kecamatan Ile Ape

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Ile Ape, Kabupaten Lembata, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dalam kehidupan sosial mereka, khususnya dalam hal pernikahan. Salah satu bentuk penghormatan terhadap adat yang paling kuat terlihat dalam larangan pernikahan sesama suku Lamaholot. Berbeda dengan wilayah lain yang mungkin hanya melarang pernikahan dalam lingkup suku atau fham tertentu, masyarakat Ile Ape memegang teguh prinsip bahwa pernikahan antarindividu yang sama-sama berasal dari suku Lamaholot sepenuhnya dilarang. Larangan ini bukan didasarkan pada hukum agama atau hubungan kekerabatan biologis, melainkan murni pada kepercayaan adat bahwa individu dari suku yang samameskipun berasal dari suku atau desa berbeda tetap dianggap sebagai bagian dari satu "darah" budaya yang sama, dan oleh karena itu tidak boleh disatukan dalam ikatan pernikahan. Keyakinan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan diinternalisasi sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur serta pemeliharaan tatanan sosial yang dianggap sakral dan tidak bisa dilanggar.

Wawancara dengan para tokoh adat dan tokoh agama di desa ini mengungkapkan bahwa pelanggaran terhadap larangan tersebut diyakini akan mendatangkan sanksi sosial maupun malapetaka yang berdampak pada pelaku dan keturunannya. Bahkan, dalam beberapa kasus, pasangan yang tetap bersikeras menikah sesama suku akan mengalami penolakan adat, pengucilan sosial, dan hilangnya legitimasi dalam masyarakat. Tokoh agama sendiri menyatakan bahwa secara hukum Islam tidak ada larangan untuk menikah sesama suku selama tidak memiliki hubungan darah atau mahram, namun mereka tetap menghormati keputusan dan pandangan adat yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa di Desa Ile Ape, adat memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mengatur kehidupan masyarakat, bahkan dapat mengungguli hukum agama dalam praktik sosial tertentu.

Ketaatan terhadap larangan ini juga dipengaruhi oleh peran penting para tetua adat sebagai penjaga nilai-nilai budaya. Mereka tidak hanya memimpin prosesi pernikahan, tetapi juga bertindak sebagai pengawas moral yang memastikan bahwa setiap ikatan perkawinan berjalan sesuai aturan adat yang telah

ditetapkan. Dengan demikian, larangan pernikahan sesama suku Lamaholot di Desa Ile Ape bukan hanya menjadi norma sosial, tetapi juga simbol keberlanjutan identitas budaya. Keberadaan larangan ini menjadi bukti bahwa adat masih memegang peranan utama dalam mengatur kehidupan masyarakat, dan menjadi dasar utama dalam penentuan sah atau tidaknya sebuah pernikahan di mata komunitas adat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dalam kehidupan sosial mereka, khususnya dalam hal pernikahan. Salah satu bentuk penghormatan terhadap adat yang paling kuat terlihat dalam larangan pernikahan sesama suku Lamaholot. Berbeda dengan wilayah lain yang mungkin hanya melarang pernikahan dalam lingkup suku atau fham tertentu, masyarakat Ile Ape memegang teguh prinsip bahwa pernikahan antarindividu yang sama-sama berasal dari suku Lamaholot sepenuhnya dilarang. Larangan ini bukan didasarkan pada hukum agama atau hubungan kekerabatan biologis, melainkan murni pada kepercayaan adat bahwa individu dari suku yang samameskipun berasal dari suku atau desa berbeda tetap dianggap sebagai bagian dari satu "darah" budaya yang sama, dan oleh karena itu tidak boleh disatukan dalam ikatan pernikahan. Keyakinan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan diinternalisasi sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur serta pemeliharaan tatanan sosial yang dianggap sakral dan tidak bisa dilanggar.

2. Analisis Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Larangan Pernikahan Sesama Suku dalam Masyarakat Lamaholot di Desa Ile Ape

a. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Sesama Suku di Desa Ile Ape

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan sesama suku tidak dilarang selama tidak terdapat hubungan mahram, seperti hubungan nasab (garis keturunan), hubungan semenda (mertua, menantu), maupun hubungan sesusuan (*radha'ah*) (Firdaus et al., 2024). Hal ini dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 23, yang merinci siapa saja yang haram untuk dinikahi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَاۤىِٕكُمْ وَرَبَاۤىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَاۤىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖفَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖوَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَاۤىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙوَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya; *Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Islam membedakan antara larangan karena hubungan kekerabatan dengan larangan yang hanya berdasarkan kesamaan suku atau marga. Kesamaan suku tidak otomatis membuat seseorang menjadi mahram. Oleh karena itu, pernikahan antara dua orang dari suku yang sama tetap sah dan diperbolehkan, selama mereka tidak berada dalam batas-batas yang ditetapkan sebagai mahram secara agama. Misalnya, pernikahan antara dua orang dari suku Lamaholot yang tidak memiliki hubungan darah tetap diperbolehkan dalam syariat Islam.

Hukum Islam melihat pernikahan dari sisi rukun dan syarat sah pernikahan, yaitu adanya calon suami dan istri yang halal, adanya wali bagi perempuan, ijab dan qabul, serta kehadiran dua orang saksi. Tidak ada satu pun dalil yang menyebutkan bahwa kesamaan suku, marga, atau etnis menjadi penghalang pernikahan. Maka, menolak pernikahan hanya karena kesamaan suku tanpa dasar mahram merupakan bentuk tambahan larangan yang tidak diajarkan dalam Islam.

Ulama fikih klasik maupun kontemporer pun tidak menyebut kesamaan suku sebagai dasar larangan pernikahan. Bahkan dalam kitab-kitab fiqh seperti *Fath al-Mu'in, al-Majmu'*, dan *Bidayatul Mujtahid*, pembahasan mengenai larangan pernikahan selalu merujuk pada aspek hubungan darah atau penyusuan, bukan etnis. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat inklusif dan universal, tidak dibatasi oleh struktur sosial kesukuan yang bersifat lokal.

Lebih lanjut, Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya juga tidak pernah memberikan larangan terhadap pernikahan lintas suku, bahkan beliau sendiri menikahi dan menikahkan dari berbagai suku untuk mempererat persaudaraan antarumat Islam. Pernikahan tidak lagi dilihat dari garis keturunan suku semata,

melainkan dari iman, akhlak, dan kesiapan membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Selain itu, dalam konteks hukum Islam, pelarangan sesuatu harus memiliki dasar yang *qath'i* (pasti) dari Al-Qur'an atau hadis yang sahih. Suatu hukum tidak bisa dibentuk hanya berdasarkan tradisi atau keyakinan turun-temurun jika tidak memiliki landasan syar'i yang kuat.

Maka dari itu, larangan pernikahan hanya karena kesamaan suku tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari ajaran Islam, sebab tidak ada dalil eksplisit maupun implisit yang mendukungnya. Islam sangat menentang penambahan hukum yang tidak bersumber dari wahyu, apalagi jika hal itu sampai membatasi hak-hak individu dalam menjalankan kehidupan *syar'i*.

Akhirnya, sikap yang bijak menurut Islam bukanlah menolak adat secara keseluruhan, tetapi meluruskan adat yang keliru agar tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jika suatu tradisi menimbulkan kesulitan (masyaqqah), menimbulkan kerugian, atau menyalahi hak asasi manusia yang diakui syariat, maka sudah seharusnya ditinjau ulang. Dalam hal ini, Islam membuka ruang untuk melakukan islah adat (reformasi adat) agar selaras dengan nilai-nilai Islam yang *Rahmatan lil 'alamin.*

b. Analisis Hukum Adat terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Sesama Suku di Desa Ile Ape

Dalam perspektif hukum adat Lamaholot, larangan pernikahan sesama suku merupakan norma tidak tertulis yang bersumber dari nilai budaya, sistem kekerabatan, dan kepercayaan spiritual masyarakat setempat. Sistem kekerabatan di Lamaholot bersifat patrilineal, yang berarti garis keturunan ditarik dari pihak ayah, dan anggota satu suku (marga) dipandang berasal dari satu leluhur yang sama. Oleh karena itu, meskipun secara biologis tidak memiliki hubungan darah langsung, dua orang dari suku yang sama dianggap "saudara besar" dan secara adat dilarang untuk menikah. Aturan ini bertujuan untuk menjaga kemurnian garis keturunan (rahi), memperkuat solidaritas antar suku, serta mencegah konflik sosial yang mungkin muncul akibat pernikahan internal dalam satu marga (Ratuloly dkk., 2021).

Larangan ini juga tidak bisa dilepaskan dari prinsip dasar hukum adat yang mengedepankan keteraturan sosial (*tana ehan*), harmoni kolektif, dan keberlangsungan warisan budaya leluhur (*ara belen*). Dalam konteks pernikahan, hukum adat tidak hanya mengatur soal hubungan pribadi dua insan, tetapi juga menyangkut hubungan komunal antarsuku, termasuk hak-hak warisan, posisi dalam ritus adat, serta partisipasi dalam upacara sosial. Bila larangan ini dilanggar, pelanggar dapat dikenakan sanksi adat yang bervariasi,

mulai dari teguran ringan, pengucilan sosial, hingga denda adat berupa hewan, hasil kebun, atau kain tenun. Dalam kasus ekstrem, keluarga pelanggar bisa dikeluarkan dari struktur sosial suku dan tidak lagi diperkenankan ikut dalam ritus adat seperti upacara kematian, pesta panen, atau ritual leluhur.

Yang menarik, hukum adat Lamaholot menunjukkan fleksibilitas dalam penyelesaian kasus pelanggaran larangan ini. Dalam beberapa kasus, terdapat mekanisme "pemulihan" (*tobe mata*) atau "perdamaian adat" (*moan lirin*) yang difasilitasi oleh tetua suku. Melalui ritus simbolik atau pengakuan bersama, pelanggar dapat mengakui kesalahannya dan membayar denda sebagai bentuk permohonan maaf kepada leluhur dan masyarakat. Hal ini mencerminkan sifat hukum adat yang restoratif dan bertujuan menjaga keseimbangan hubungan sosial, bukan menghukum semata.

Dengan demikian, larangan pernikahan sesama suku menurut hukum adat di Desa Ile Ape bukan hanya sekadar aturan turun-temurun, melainkan bentuk konkret dari sistem sosial yang kompleks, yang mengikat seluruh anggota masyarakat dalam jaringan tanggung jawab kolektif, spiritual, dan kultural. Meskipun zaman terus berubah, prinsip-prinsip adat seperti ini tetap memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat Lamaholot, karena menyentuh akar identitas, kehormatan, dan keberlangsungan budaya lokal.

Namun demikian, masyarakat Kecamatan Ile Ape menunjukkan adanya integrasi nilai antara hukum adat dan hukum Islam. Meskipun Islam memperbolehkan pernikahan sesama suku, masyarakat tetap memegang teguh larangan adat tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai leluhur dan keteraturan sosial. Dalam hal ini, tokoh adat dan tokoh agama berperan penting dalam menjembatani dua sistem hukum tersebut, sehingga nilai-nilai Islam dapat diinternalisasi tanpa harus menghilangkan identitas adat. Integrasi ini menunjukkan adanya harmoni antara adat dan syariat dalam praktik sosial masyarakat Lamaholot. Larangan ini diberlakukan secara mutlak di Kecamatan Ile Ape dan telah menjadi konsensus bersama yang dijaga secara turun-temurun. Tidak ditemukan kasus pelanggaran yang mencolok karena masyarakat meyakini bahwa melanggar adat sama artinya dengan mengkhianati leluhur. Oleh karena itu, larangan pernikahan sesama suku tidak sekadar norma sosial, melainkan simbol keberlanjutan adat dan identitas komunitas.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas tentang Tradisi Larangan Pernikahan Sesama Suku Dalam Persepektif Hukum Islam

Dan Hukum Adat Di Suku Lamaholot (Studi Kasus Di Kecamatan Ile Ape)dapat disimpulkan oleh peneliti sebagai berikut:

Tradisi larangan pernikahan sesama suku dalam masyarakat Lamaholot di Kecamatan Ile Ape merupakan manifestasi dari sistem nilai yang hidup dan berkembang dalam struktur sosial adat. Larangan ini tidak bersumber dari hubungan biologis (mahram) sebagaimana yang dikenal dalam hukum Islam, melainkan dari pemahaman kolektif masyarakat bahwa anggota satu suku adalah bagian dari satu garis leluhur yang sama, yang wajib dijaga kemurniannya. Dengan demikian, pernikahan sesama suku dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma adat.

lalu berbasis pada hubungan darah biologis, masyarakat memaknai kesamaan suku sebagai ikatan persaudaraan adat yang tidak boleh dilanggar. Tradisi ini tetap kuat karena didukung oleh mekanisme sosial dan sanksi adat yang mengikat.

Secara hukum Islam, pernikahan sesama suku tidak termasuk dalam kategori pernikahan yang dilarang secara syar'i, selama tidak terdapat unsur mahram nasab, sesusuan, maupun semenda. Islam menetapkan bahwa prinsip sahnya pernikahan bergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun nikah, bukan pada kesamaan suku atau asal etnis. Oleh karena itu, secara doktrinal, hukum Islam bersifat inklusif dan membuka ruang pernikahan lintas suku selama tidak melanggar ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.

Namun, masyarakat Ile Ape memilih untuk tetap mematuhi hukum adat sebagai bagian dari identitas dan kehormatan kolektif. Hukum Islam dan hukum adat tidak diposisikan sebagai hal yang saling bertentangan, melainkan berjalan berdampingan melalui pendekatan dialogis dan kompromi sosial. Tokoh agama dan adat memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai syariat dan budaya lokal, sehingga integrasi keduanya tetap harmonis dan kontekstual.

Penelitian ini membuka ruang bagi kajian lanjutan, terutama dalam menggali perbandingan dengan tradisi serupa di wilayah lain, serta menelusuri dampaknya terhadap dinamika keluarga dan peran generasi muda dalam merawat adat istiadat.

Daftar Rujukan

Arumarani, D. (2022). Analisis Larangan Perkawinan Satu Suku di Tinjau Dari Hukum Islam di Desa Sukabarak Kecamatan . Gunung Sahilan Kampar. *Skripsi Universitas Islam Negeri Riau*, 106.

Atmajaya P, A. (2021). Penerapan Diskon Melalui Pembayaran Gopay ditinjau dari Etika Bisnis Islam: Studi kasus Seblak Indoleta Tejo Agung Metro Timur Lampung. *Jurnal Ekonomi Syariah*.

Elvina Jahwa, Desi Pitriani Siregar, M. Riski Harahap, Ihsan Mubarak, & Ali Akbar. (2024). Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. *Journal Of Social Science Research*, *4*(1), 1692–1705.

Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, *14*(2), 88–94. https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590

Fajri, Y., Eva, Y., & Puspita, M. (2021). *Vol. XXII Nomor 2, November 2021 | 117*. *XXII*(November), 117–132.

Firdaus, Tati Yalina Andiyah, Lidya andita, Saras Ainurrochimah, Fajrul hakim, & Wismanto Wismanto. (2024). Mahram dan Pembatasan Pernikahan dalam Konteks Hukum Islam. *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, *2*(1), 132–139. https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.291

Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, N. H. A. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).

Husnullail, M., Risnita, Jailani, M. S., & Asbui. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset lmiah. *Journal Genta Mulia*, *15*(0), 1–23.

Ibrahom, J. dan J. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. 55–64.

Islam, U., & Banda, N. A. (2025). *Dalam Masyarakat Adat Melayu Desa Kabun Pelarangan Perkawinan Sesuku (EXSOGAMY)*.

Ismail, H. (2022). Pendekatan Antropologi Dan Sosiologi Dalam Studi Islam. *Jurnal Teknologi Dan Bisnis*, *3*(2), 239–260. https://doi.org/10.37087/jtb.v3i2.97

Jamaludin, Z. R. (2024). *Tinjauan Hukum Adat Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Sesama Suku Masyarakat Desa Lohayong Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur*. 1–23.

Kewarisan, A., & Hamzah, N. L. (2024). Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, *2*(1), 161–170.

Maimun, M. (2022). Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan*, *9*(1), 12–21. https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263

Musyafah, A. A., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2020). *Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum islam*. *02*(November), 111–122.

Nurbayani Rahangiar1, K. A. A. W. (2024). *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Pela Gandong Prespektif Sadd Al-Dhara'i' (Studi Kasus Suku Seram dan Suku Kei di Maluku Tengah*. *4*.

Nurfajriani Wiyanda Vera , Ilhami Muhammad Wahyu Mahendra Arivan, Sirodj Rusdy Abdullah, M. W. A. (2024). *Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif Wiyanda*. *10*(September), 1–23.

Nurliana, N. (2022). Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, *19*(1), 39–49. https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397

Nurliana, N., & Azizah, M. A. (2023). *Hukum Hukum Perdata Perdata Islam Islam Indonesia Indonesia* (Issue May).

Prayudi, R. (2022). *Dosen Pengampu Rian Prayudi , S . H ., M . H Oleh : Alhuda Aidil Lukman Nim . 2174201030 Kelas 2 B Hukum S1 Hukum Fakultas Hukum*.

Purnama, H. (2021). Hukum Islam, Adat Dan Hukum Negara Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Melayu Di Pekanbaru Riau: Keabsahan, Etika, dan Administrasi Perkawinan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *14*(1), 1. https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14101

Rahmawati, T. (2021). *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*.

Randa, P. (2024). Tradisi Larangan Pernikahan Semarga Dalam Suku Melayu Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tibawan Kecamatan Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu Pastabikul Randa Universitas Islam Malang , Jawa Timur , Indonesia Abstrak di luar ataupun di d. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, *18*(1), 534–557.

Ratuloly, H., Akil, M., & Syarifuddin, S. (2021). Pernikahan Semarga Bagi Masyarakat Lamaholot dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, *2*(2), 118. https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v2i2.157

Saadah, M., Prasetiyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Al-'Adad : Jurnal Tadris Matematika*, *1*(2), 54–64. https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113

Saepudin Muhtar, Anwar Rachwan, P. T. (2020). Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Adminitrasi. *1*, 64. https://repository.unair.ac.id/112194/

Sembiring, F., T Mokorimban, M. A., & Worung, P. F. (2023). Larangan Perkawinan Semarga bagi Masyarakat Suku Batak Karo dan Sanksi Adat Perkawinan Semarga berdasarkan Hukum Adat dan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, *XII*(2).

Shandi, I. F. A. (2020). Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Dimasa Peminangan. *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, 92.

Wahyudi, M. E. (2020). Implementasi Perpres Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Di SMPN 4 Kediri. *Etheses*, 23.

Werliana, H., Hati, P. C., Islam, U., Raden, N., Palembang, F., & Selatan, S. (2024). *Jurnal Studi Ilmu Komunikasi P . ISSN : 2985-9549 E . ISSN : 2986-4593 Pola Komunikasi Orang Tua kepada Anak terhadap Pelanggaran Adat Larangan Pernikahan*

Sesama Suku (Studi Fenomenologi Terhadap Adat Larangan Pernikahan Sesama Suku Tanjung Diminangkabau. *03*, 1–8.

Widiyanto, H. (2020). *Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)*. Jurnal Islam Nusantara, 4(1), 103. https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213

Wiranti. (2021). *Nilai-Nilai Islam dalam Budaya Mangonggo di Desa Amola Kecamatan Binuang Kab.* Polman. 1–23.